

## Pelapisan Sosial Masyarakat Melayu-Jawa Pada Masa Kesultanan Palembang Abad 19

Dewi Setyawati<sup>1</sup>, Yuliarni<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang

Email: destya11@gmail.com

Received: 2021-05-03

Revised: 2021-07-24

Accepted: 2021-08-04

Published: 2021-08-30

### Abstract

*This article is to find out the social layers of the Palembang people which began to emerge since the existence of the Palembang Sultanate. In addition to the natives, in the 19th century the population of Palembang had several ethnic groups that had a distinctive settlement in Palembang, namely Chinese, Arab, and Malay-Javanese Palembang. However, the social stratification of this society is focused on the Malay-Javanese community (Iilir Palembang area). During this sultanate, the population was divided into two major groups, namely the aristocratic aristocracy and the common people. The purpose of this study is to analyze the relationship between layers of Malay-Javanese society (Iilir area of Palembang) and their role in each area of social stratification of society. This research is qualitative in nature using literature studies and interviews. The results showed that the people of Palembang, especially Malay-Javanese, had social layers, the area of social stratification of the people of Palembang had a role as a production area for the Palembang Sultanate Period, the Malay-Javanese people of Palembang had titles that determined the Goo-gook area, and Palembang community relations, especially Malay-Javanese. with immigrant communities such as ethnic Arabs, Chinese, and Indians they live side by side with high tolerance.*

**Keywords:** Palembang people, Malay ethnicity, Arab ethnicity, Tionghoa ethnicity, Palembang Sultanate

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui Pelapisan sosial masyarakat Palembang yang mulai timbul sejak adanya Kesultanan Palembang. Selain penduduk asli, Pada abad ke-19 populasi penduduk Palembang memiliki beberapa kelompok etnis yang memiliki eksistensi Permukiman yang khas di Palembang yaitu Tionghoa, Arab, dan Melayu-Jawa Palembang. Namun pelapisan sosial masyarakat ini di khususkan pada masyarakat Melayu-Jawa (daerah ilir Palembang). Pada masa kesultanan ini, penduduk dibagi dalam dua golongan besar, yaitu golongan bangsawan bangsawan dan rakyat biasa. Tujuan Penelitian ini menganalisis tentang hubungan antar lapisan masyarakat Melayu-Jawa (daerah ilir Palembang) dan peran mereka diperan disetiap wilayah pelapisan sosial masyarakatnya. Penelitian ini bersifat kualitatif yang menggunakan studi literatur dan wawancara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Palembang khususnya melayu-jawa mempunyai lapisan sosial, Wilayah pelapisan sosial masyarakat Palembang mempunyai Peran sebagai wilayah produksi Masa Kesultanan Palembang, Masyarakat Melayu-Jawa Palembang mempunyai gelar yang menentukan wilayah Goo-gook, dan Hubungan masyarakat Palembang khususnya Melayu-Jawa dengan masyarakat pendatang seperti etnis Arab, Cina, dan India mereka hidup berdampingan dengan toleransi yang tinggi.

**Kata kunci:** Masyarakat Palembang, Etnis Melayu, Etnis Arab, Etnis Tiamghoa Kesultanan Palembang

Copyright © 2021, *Heuristik: Jurnal Pendidikan Sejarah*. All right reserved

## Pendahuluan

Pelapisan sosial suatu masyarakat bila di tinjau secara historis mulai ada sejak manusia mengenal kehidupan bersama dalam suatu organisasi masyarakat. Semakin majunya perkembangan teknologi suatu masyarakat semakin kompleks pula sistem lapisan-lapisan

dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh semakin kompleksnya suatu masyarakat semakin banyak perbedaan kedudukan dan perannya. Pelapisan sosial terbentuk selama dalam kelompok masyarakat memiliki hasrat menghargai perbedaan serta toleransi, dan setiap kelompok masyarakat pasti memiliki sesuatu yang diharganya. Penghargaan ini dapat diukur dari kekuasaan, kekayaan, kehormatan, ilmu pengetahuan atau keshalehan

Di daerah Sumatera Selatan yang sekarang beribukota di Palembang, dulunya dikenal dengan kerajaan Maritim. Pada dasarnya tidak begitu menyolok perbedaan antaran golongan penguasa dan rakyat biasa. Hal ini mengalami perubahan setelah mendapat pengaruh dari Jawa terutama di pusat kerajaan mulai adanya perubahan dalam struktur sosial. Dalam hal ini pola kepemimpinan kesultanan Palembang Darussalam mempengaruhi pelapisan sosial yang ada di masyarakat Sumatera Selatan (Abdullah, 1983).

Palembang merupakan salah satu Kota yang multikultural yang di dalamnya terdapat berbagai kampung yang beragam etnis. Kota Palembang terbagi menjadi 2 bagian yaitu bagian ulu (Kawasan Seberang Ulu) dan bagian ilir (Kawasan Seberang Iilir) yang dipisahkan oleh sungai Musi. Menurut Sevenhoven Sungai Musi yang membelah kota menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Palembang (Dedi, 2009). Daerah-daerah uluan Sumatera Selatan susunan masyarakatnya masih sangat sederhana. Pelapisan sosialnya hanya terdiri dari golongan penguasa tradisional dan rakyat biasa (mata-gawe). Penguasa ini ditentukan oleh Sultan dan dapat disamakan dengan golongan-golongan elite Jawa. Pemilihan pemimpin daerah uluan ini masih berdasarkan status sosial dan kharismatis. Sistem marga yang ada di uluan ini tentu saja tidak terlepas dari pengaruh pusat Kesultanan Palembang

Sudah sejak dahulu kala daerah aliran sungai terbesar di Sumatera Selatan, yang sekarang disebut Sungai Musi, memberikan kondisi dan suasana yang menguntungkan bagi pengembangan kerajaan-kerajaan setempat. Palembang yang terletak di dua tepi Sungai Musi, di mana Sungai Ogan dan Komering bermuara didekat Pulau Kembara, pada masa Kesultanan merupakan pusat Kesultanan. Daerah Iilir Sebagai pusat Kesultanan maka wajar bila Palembang memiliki pelapisan sosial yang lebih unik dibandingkan daerah uluan Sumatera Selatan. Di Palembang penduduk dapat dibagi dalam dua golongan besar yang masing-masing memiliki bagian-bagiannya. Golongan itu terdiri dari golongan bangsawan dan rakyat. Bangsawan berarti golongan turunan raja dan kaum ningrat. Kedudukan sebagai bangsawan karena kelahiran atau perkenan raja. Golongan (Sevenhoven, 2015). Di samping dua golongan ini, Ulama mendapat tempat sendiri dan tidak termasuk ke dalam dua golongan karena ulama dapat dipilih dari semua golongan penduduk dan mereka ditentukan oleh Sultan sehingga harus dianggap sebagai pegawai kerajaan.

Setelah runtuhnya Kesultanan Palembang, pelapisan sosial ini tetap ada dalam kehidupan masyarakat Palembang. Pada zaman Hindia Belanda pelapisan yang ada pada masyarakat dipupuk sedemikian rupa untuk mencapai tujuan Belanda sesuai dengan politik kolonial Belanda. Pelapisan sosial ini tetap bertahan pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia, bahkan tetap mewarnai kehidupan masyarakat Palembang sampai sekarang. Hal ini terlihat dengan masih adanya masyarakat Palembang yang memakai simbol-simbol dan gelar sesuai dengan golongannya serta masih adanya sekelompok masyarakat Palembang yang mendiami lokasi tertentu yang hanya terdiri satu golongan saja, misalnya kelompok Kemas, Kelompok Raden dan sebagainya. Fungsi dan peranan mereka mulai tergeser sesuai dengan kemajuan zaman yang disebabkan oleh kemajuan pendidikan masyarakat Palembang serta

adanya akulturasi budaya asing dan asimilasi perkawinan antar etnis dan antar lapisan masyarakat.

## Metode Penelitian

Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode Sejarah (Metode Historis). Menurut Gottschalk dalam Herlina (2008) mengatakan yang dimaksud dengan metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Menurut Sumadi Suryabrata (1988), metode historis adalah cara untuk membatasi rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensistensikan bukti-bukti untuk menegakkan suatu fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Metode sejarah dalam pengertiannya secara umum adalah penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perpektif historik (Abdurrahman, 2011).

Metode sejarah dapat diartikan sebagai metode penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur, atau teknik yang sistematis sesuai asas-asas dan aturan ilmu sejarah (Daliman, 2002). Metode yang digunakan pada Penelitian Sejarah menggunakan metode Penelitian Kualitatif. Menurut Kartodirdjo (1982), Metode penelitian kualitatif sering diberlakukan pada ilmu-ilmu kebudayaan (*Geiteswisschaften*) yang mencakup humaniora, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial yang bertujuan untuk menemukan gejala yang unik atau individual (*ideografis*) dan bukan mencari hukum-hukum umum (*nomotetis*) seperti pada ilmu-ilmu alam (*Naturwissenschaften*) (Priyadi, 2012). Sedangkan konsep yang di gunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan Konsep Deskriptif.

## Hasil dan Pembahasan

### a. Pelapisan Masyarakat Palembang Masa Kesultanan Palembang

Dari sudut ketatanegaraan penduduk dibagi menjadi dua golongan besar, yang masing-masing mempunyai bagian-bagiannya. Paling atas adalah Raja atau Sultan. Kekuasaan dan petinggi lainnya bertindak sewenang-wenang. Dalam urusan-urusan yang tidak diperdulikannya, ia memberlakukan hukum-hukum, seperti tersebut dalam undang-undang dan pejagim-pejagim (piagam-piagam) dan Quran, tetapi menyangkut kepentingannya atau jika ia ingin mencampurinya supaya memberi ganjaran atau hukuman, maka kemauannya menjadi sesuatu huku, suatu keharusan dan tidak seorangpun berani menentanginya. Gelar yang ditetapkan oleh Raja Majapahit untuk raja adalah susuhunan. Kemudian orang-orang Arab memberi kepada raja gelar Sultan (Sevenhoven, 2015).

Masyarakat Palembang pada masa kesultanan Palembang terbagi dua golongan besar yaitu golongan bangsawan dan golongan rakyat. Golongan bangsawan merupakan keturunan Raja atau kaum ningrat. Kedudukan ini didapatkan atas kelahiran dan mendapatkan gelar kebangsawanan. Gelar ini ditetapkan oleh Sultan Abdurrahman menurut derajat ibu yang melahirkan. Golongan ini terdiri dari Pangeran, Raden dan Masagus. Pangeran berarti memerintah, diberikan kepada seseorang yang mempunyai jabatan. Bila pangeran menikah dengan puteri Pangeran, anak laki-laknya diberi gelar Raden berarti tinggi (luhur) atau terpilih dan bila wanita diberi gelar Raden Ayu yang berarti cantik, terpilih dan agung. Masagus diberikan kepada anak laki-laki yang lahir dari perkawinan seorang Raden atau Pangeran dengan seorang wanita dari golongan rakyat biasa. Masagus berarti berharga banyak. Bila dari

perkawinan ini wanita diberi gelar Masayu yang artinya si cantik yang berharga banyak (Sevenhoven, 2015).

Golongan kedua terdiri dari Kiai Mas, Kiai Mas Agus dan rakyat jelata. Istilah Kiai ini dipakai oleh seseorang laki-laki, sedangkan seorang wanita memakai istilah Nyai. Istilah-istilah ini mula-mula dibawa dari Demak dan pada mas Kesultanan dijadikan gelar. Gelar Kiai Mas yang lazim disebut Kemas diberikan kepada laki-laki dari perkawinan seorang Masayu dengan laki-laki biasa. Bila anak dari perkawinan tersebut seorang wanita maka anaknya bergelar Nyai Mas atau lazim disebut Nyimas. Gelar Kiai Agus yang lazim disebut Kiai Agus diberikan kepada anak laki-laki dari perkawinan mentri dan turunan Raden dengan rakyat jelata. Sedangkan gelar Kiai Ayu yang lazim disebut Nyanyu diberikan kepada anak wanita dari hasil perkawinan tersebut. Mereka diwajibkan ikut serta dalam pekerjaan-pekerjaan ringan dan halus, tetapi tidak untuk mendayung atau mengerjakan pekerjaan kasar (Sevenhoven, 2015).

Gelar-gelar yang dipergunakan penduduk Palembang ini yaitu Raden, Raden Ayu, Masagus, Masayu, Kemas, Nyimas, Kiagus dan Nyayu ditetapkan oleh Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo menurut garis keturunan ayah. Sejak adanya ketetapan ini maka gelar-gelar tersebut dipakai sesuai dengan gelar yang dipakai oleh Ayahnya. Golongan rakyat jelat terbagi lagi dalam empat golongan yaitu orang miji, orang senau (senau), orang gadaian dan budak belian atau hamba sahaya. Orang miji berada di bawah naungan salah seorang hamba pembesar kerajaan atau seorang bangsawan. Orang-orang miji ini berhak untuk berpindah tuan dari seorang pembesar kepada seorang pembesar lainnya, dari seorang bangsawan kepada bangsawan lainnya, dari seorang pembesar kepada seorang bangsawan atau sebaliknya. Orang-orang miji ini mempunyai kewajiban memenuhi kehendak tuan mereka. Sebagian besar orang-orang miji adalah pengrajin dan adapula yang ahli dalam berbagai bidang seni. Untuk melaksanakan kewajiban mereka orang-orang miji ini mempunyai sejumlah alingan. Alingan ini membantunya dalam pekerjaan yang ditugaskan oleh tuannya. Alingan ini berarti keluarga, tetapi anggota keluarga alingan ini tidak hanya terdiri dari kaum keluarganya saja melainkan dapat juga orang yang bukan keluarga. Hal ini disebabkan orang miji ini adalah orang-orang yang membela hak-haknya dan memberikan bantuan kepadanya jika mereka memerlukannya (Sevenhoven, 2015).

Alingan dimobilisir sewaktu perang atau tukang ahli (termasuk seniman pengrajin) di waktu damai. Alingan dan miji ini berlindung dan dilindungi para ahli dan bangsawan. Kewajiban mereka terhadap peindungnya adalah memproduksi komoditis sesuai dengan keahlian dan kemampuan untuk mendapatkan income bersama pelindungnya. Miji dan alingan berhak untuk pindah ke pelindung lain yang lebih menjamin kehidupan mereka (Hanafiah, 1995).

Orang senan adalah golongan yang lebih rendah dari orang miji. Golongan ini tidak boleh dipekerjakan oleh siapapun kecuali oleh raja. Kewajiban yang harus mereka lakukan adalah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tangan ringan. Di samping itu mereka juga digunakan untuk membuat dan mendayung serta memperbaiki perahu-perahu raja ataupun memperbaiki rumah-rumahnya. Baik orang miji maupun orang Senan bebas dari kewajiban membayar pajak. Golongan rakyat jelata lainnya adalah orang-orang gadaian dan budak belian. Orang gadaian diwajibkan bekerja untuk orang-orang yang meminjamkan uang selama waktu hutang-hutang ayahnya sendiri belum dibayar. Sedangkan budak belian mempunyai

kewajiban bekerja kepada orang yang telah memiliki dirinya selama jangka waktu tertentu sebelum dibebaskan tuannya (Sevenhoven, 2015).

Antara pelindung, alingan, miji, profesi, produksi dan tempat mereka, merupakan suatu sistem jaringan yang disebut guguk. Guguk ini biasanya punya profesi dan hasil produksi khusus seperti pengrajin besi, tembaga, anyaman dan lain-lain (Hanafiah, 1995). Sifat produksinya tidak khusus memenuhi kebutuhan sendiri tetapi memenuhi juga kebutuhan Kesultanan. Wilayah tempat guguk ini nerada biasanya disebut dengan keahlian atau hasil dari produksi, misalnya (1) Pelampitan adalah Wilayah ahli atau pengrajin lampit, (2) Sayangan Wilayah ahli tembaga, (3) Kuningan adalah Wilayah ahli kuningan, (4) Palengan adalah Wilayah ahli pembuat minyak, dan (4) Kepandean adalah Wilayah ahli besi (Hanafiah, 1989). Golongan budak adalah golongan yang paling rendah. Fungsi mereka lebih bersifat komoditi. Budak memang seorang abdi, tapi tidak dapat terjadi seseorang menjadi budak budak karena terlibat utang yang tidak lunas (Hanafiah, 1995).

Di samping golongan di atas, ulama mendapat tempat tersendiri dan tidak termasuk dalam salah satu golongan penduduk. Golongan ulama ini ditentukan oleh raja dan oleh karenanya dianggap sebagai pegawai kerajaan (Sevenhoven, 2015). Hal ini memungkinkan karena sistem dan tata kenegaraan pada masa kesultanan ini diatur dan bersendikan hukum Islam dan berlakunya hukum adat dijiwai oleh sendi-sendiri hukum syara'. Di lingkungan kraton kesultanan, posisi ulama sangat terhormat dan memegang peranan penting selaku penasihat Sultan.

Ulama-ulama yang ada pada masa Kesultanan inilah banyak yang menjadi alim ulama terkemuka pada zamannya, baik yang berasal dari golongan bangsawan maupun dari golongan rakyat biasa. Hal ini dikemukakan oleh H. Rusdhy Cosim dalam buku *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan yang Dedit oleh K.H.O Gajahnata dan Sri-Edi Swasono* sebagai berikut:

1. Pangeran Suriokesumo Alim Muhammad arsyad,
2. Pangeran Penghulu Nato Agamo Akil,
3. Kyai Haji Kemas Abdul Somad
4. Kyai Haji Kemas Muhammad Azhari
5. Kyai Haji Kemas Abdul Hamid bin Masagus Mahmud
6. Kyai Haji Kemas Abdul Rahman (Rusdhy, 1986).

Selain penduduk asli, di Palembang terdapat juga penduduk Timur Asing yaitu orang-orang Cina, Arab, India dan lain-lain. Orang-orang asing ini mendapatkan perlakuan sama seperti penduduk lainnya. Diantara mereka ada yang kawin dengan wanita Palembang dan menjadi alingan para miji atau senan. Beberapa orang Cina yang memeluk Islam kadang-kadang diberi gelar. Administratur tambang timah kebanyakan orang-orang bertukar agama. Mereka mendapatkan gelar demang. Orang-orang Arab juga mendapat gelar Pangeran misalnya Pangeran Umar (Sevenhoven, 2015).

Penggolongan masyarakat Palembang berdasarkan pelapisan sosial ini mempengaruhi pola tingkah laku mereka. Golongan bangsawan cenderung mempunyai pola tingkah laku seperti orang Jawa, sedangkan golongan rakyat cenderung mempunyai tingkah laku seperti orang Melayu. Hal ini dipengaruhi oleh ruang lingkup pergaulan mereka. Ruang lingkup pergaulan golongan bangsawan hanya dikalangan bangsawan itu sendiri, sedangkan kita ketahui bahwa cikal bakal golongan berasal dari Jawa. Tradisi Jawa tentu saja terbawa dalam

kehidupan mereka dan terus berlanjut pada keturunan mereka. Hal ini menyebabkan pola tingkah laku mereka cenderung seperti orang Jawa. Sebaliknya golongan rakyat yang bergaul dengan orang-orang Melayu yang berdagang di Palembang sehingga pola tingkah laku mereka seperti orang Melayu.

Setiap perkawinan lelaki luar keraton dengan wanita keraton makan kepada lelaki dari luar keraton diberi hak kepada anak-anaknya menyanggah gelar dari garis keturunan ibunya. Umpama sang ibu atau isteri bergelar Raden Ayu yang kawin dengan pria non bangsawan/keraton, maka anak-anaknya dapat diberi gelar Raden kepada prianya ataupun Raden Ayu kepada wanitanya. Dengan lembaga perkawinan ini maka barisan melayu-ini telah menjadi ningrat Melayu-Jawa (Hanafiah, 1995).

Pelapisan sosial ini hanya berlaku di wilayah ibukota saja yaitu Palembang. Sedangkan di luar ibukota tidak mengenal lapisan ini, wilayah ini susunan masyarakatnya masih sangat sederhana yaitu terdiri dari golongan penguasa dan rakyat biasa. Golongan penguasa ini semula merupakan kepala-kepala suku. Pada masa kesultanan Palembang, kepala suku ini diangkat Sultan sebagai penguasa dengan gelar Pangeran. Disamping itu juga ada beberapa orang dari golongan bangsawan yang diberi Dusun atau Marga kemudian menjadi penguasa di Dusun atau Marga tersebut (Sevenhoven, 1971). Penguasa-penguasa ini dapat disamakan dengan golongan elite di Jawa. Penguasa ini juga merupakan wakil Sultan di daerah uluan. Golongan rakyat biasa merupakan golongan yang harus tunduk dan mempunyai kewajiban mematuhi kehendak golongan penguasa (Abdullah, 1983).

Antara Penduduk Palembang dengan penduduk wilayah uluan dilarang Sultan menikah. Hak ini merupakan ketetapan Sultan yang tercantum dalam piagam Limbangan yang ditujukan kepada Pangeran Penghulu Pasisiran dan kepala Dipati tahun 1964. Pada pokoknya di dalam piagam ini terdapat larangan agar penduduk Dusun dilarang kawin dengan orang Palembang. Ketentuan ini dibuat dengan dasar di satu pihak untuk melindungi rakyat pedalaman dari orang-orang ibukota yang kuat ekonominya dan lain pihak melindungi hak monopoli raja atas hasil-hasil bumi (Van Royen, 1927).

#### **b. Pembagian wilayah berdasarkan Pelapisan Masyarakat Palembang.**

Pemerintahan Kesultanan ini meliputi seluruhnya wilayah Kesultanan Palembang. Wilayah Kesultanan Palembang pada masa Kesultanan meliputi wilayah kekuasaan Majapahit yang telah diwarisi Demak. Wilayah ini kemudian dikembangkan oleh para Sultan Palembang sehingga menjadi suatu wilayah yang luas. Secara garis besar, wilayah Kesultanan Palembang dapat sebagai berikut : (1) Ibukota adalah Wilayah ibukota ini merupakan tempat Kesultanan Palembang. Keraton Kuto Besak yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan berada di Ibukota. Wilayah ibukota ini meliputi daerah seberang ilir dan daerah seberang Ulu. Daerah-daerah ini membujur dari Timur ke Barat, dimulai dari sekitar Muara Sungai Keramasan di bagian barat dan berakhir di Kuala Sungsang; (2) Uluan adalah Wilayah uluan ini mencakup marga-marga yang terletak di sepanjang Sungai Musi, Rawas, Rupit, Kelingi, Beliti, Lematang, Enim, Batanghari Hari Leko, Ogan dan Komering, tanah Pasemah, tanah Semendo dan Ranau; dan (3) Bangka Belitung (Cosim, 1986).

Wilayah diluar ibukota, diatur dalam ikatan marga-marga yang terdiri dari dusun-dusun. Masing-masing marga dan dusun ada pemimpinnya sendiri yang ditunjuk oleh Sultan.

Selain dari marga-marga, wilayah di luar ibukota dibagi dalam tiga golongan yaitu wilayah Sindang, wilayah wilayah sikap dan wilayah Kepungutan.

Wilayah Sikap adalah kelompok dusun yang dikeluarkan dari kelompok marga dan diperintah langsung oleh pejabat Kesultanan. Bila pejabat ini tetap tinggal di Ibukota disebut Raban, tetapi bila tinggal di daerah bersangkutan disebut Jenang atau Danguan. Penduduk wilayah sikap ini terdiri dari berbagai campuran masyarakat, yaitu Palembang, Jawa dan lain-lain. Penduduk tersebut harus melakukan beberapa jenis pekerjaan untuk raja yang disebut "Gawerajo". Pekerjaan ini meliputi mendayungkan perahu kerajaan, menjadi penunjuk jalan, menjaga jalur-jalur pelayaran dan kadang-kadang mengerjakan pekerjaan yang lain seperti menyediakan air untuk keraton, mengatur serta menjaga penanaman padi dan perikanan di sungai-sungai, lebak-lebak, dan lebung-lebung. Dengan kata lain pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk wilayah sikap ini merupakan salah satu unsur pertahanan wilayah yang alamiah dan ampuh (Ali Amin, 1986).

Wilayah Kepungutan adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan Sultan secara langsung. Wilayah ini dibagi dalam bagian-bagian yang mengikuti cara alamiah yaitu mengikuti aliran sungai-sungai. Setiap daerah aliran sungai dikepalai oleh Raban atau Jenang. Raban diberikan kepada pejabat yang berasal dari golongan bangsawan. Sedangkan Jenang diberikan bila pejabat tersebut berasal dari golongan yang lebih rendah (Sevenhoven, 1971).

Diperbatasan daerah Kepungutan terletak wilayah Sindang. Sebagai penduduk yang tinggal di daerah perbatasan mereka berkewajiban untuk menjaga keamanan daerah perbatasan dan melindunginya dari serbuan-serbuan. Penduduk wilayah Sindang ini tidak dikenak pajak dan mereka dianggap sekutu-sekutu yang dapat dikenakan cukup (Ali Amin, 1986). Wilayah uluan yang termasuk dalam Kesultanan Palembang ini dipimpin oleh seorang Lebai penghulu. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Simbur Cahaya Bab IV di bawah judul "Aturan Kaum" yang mengatur bahwa di setiap dusun ditetapkan seorang Lebai Penghulu. Lebai Penghulu ini bertugas mengepalai segala kaum di dalam marganya. Ia dibantu oleh Khotib dan mereka bersama-sama membantu Pasirah, terutama dibidang agamaa misalnya masalah fitrah, pernikahan, pemeliharaan tempat ibdadah (Salman Aly, 1986).

Berbeda dengan sistem yang dilaksanakan atas wilayah uluan, wilayah Pulau Bangka dan Pulau Belitung ditetapkan sistem tersendiri. Wilayah ini sebenarnya sudah termasuk dalam wilayah Kesultanan Palembang sejak masa Sultan Abdurrahaman. Namun pengaturan secara tertib baru pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo sebelum masa itu tidak didapatkan penjelasan tentang sistem yang dipakai atas wilayah Pulau Bangka dan belitung (P.Deer Roo de Faille, 1971).

### **c. Simbol dan Penggunaan Gelar Pada Pelapisan Sosial Masyarakat Palembang**

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya terdapat penggunaan gelar-gelar kebangsawanan pada masyarakat Palembang. Penggunaan gelar ini ditetapkan oleh Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo menurut garis keturunan ayah. Ketetapan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena bila dilihat dari Hadist Nabi Muhammad SAW yang membicarakan prihal Fatimah anaknya, selalu tertulis Fatimah Binti Muhammad. Hal ini berarti seorang anak berhak menyandang nama Bapaknya. Di samping itu juga adat Palembang mengatur kedudukan laki-laki di atas kedudukan wanita. Hal ini dapat dilihat dalam adat perkawinan Palembang yang menetapkan laki-laki yang membiayai walaupun diselenggarakan

pihak wanita. Adapun gelar-gelar tersebut adalah: Untuk laki-laki; a. Raden, b. Masagus, c. Kemas, d. Kiagus. Untuk Wanita; a. Raden Ayu, b. Masayu, c. Nyimas, d. Nyayu.

Pemakaian nama gelar yang sudah ada pada masa kesultanan Palembang terus berlanjut pada amsa Hindia Belanda. Perbedaannya terletak pada peranan pemakaian gelar itu. Pada masa Kesultanan Palembang, masyarakat memakai gelar tersebut adalah masyarakat yang termasuk golongan atas atau masyarakat daerah ilir (Melayu-Jawa). Sedangkan pada masyarakat Hindia Belanda karena baik rakyat biasa ataupun golongan atas perannya ditetapkan oleh Belanda.

Pemakaian gelar yang ditetapkan menurut garis keturunan ayah ini menimbulkan kecenderungan wanita Palembang ingin menikah dengan laki-laki Palembang saja, terutama yang memiliki gelar kebangsawanan. Bagi orang Palembang mendapatkan seorang laki-laki yang memiliki gelar kebangsawanan memiliki kebanggaan sendiri. Di samping itu juga karena ketetapan ini wanita Palembang tidak dapat mewariskan gelarnya kepada anaknya sehingga salah satu jalan untuk mempertahankan gelar tersebut adalah dengan kawin dengan laki-laki yang memiliki gelar kebangsawanan. Sebaliknya bila wanita tersebut menikah dengan laki-laki biasa maka gelar yang dipakainya tidak berarti lagi.

Peraturan yang ditetapkan pada zaman Kesultanan yang melarang orang Palembang (Melayu-Jawa) yang tinggal di daerah ilir menikah dengan daerah uluan tetap berlanjut walaupun kesultanan Palembang telah runtuh. Masyarakat Palembang tetap menganggap larang ini sebagai suatu hal yang harus dipatuhi. Bila masih ada masyarakat Palembang tetap melakukan pernikahan dengan orang uluan, mereka hanya memandang sebelah mata bahkan tidak jarang orang tersebut dikucilkan. Dalam pergaulan sehari-hari, anggapan pernikahan dengan orang uluan ini selalu dilagukan dalam pantun pergaulan yang berbunyi :

Kapal api masuk Palembang, Banyu tenang, Jadi gelombang, ai mak mano hati dak bimbang-Gadis ulu Bujang Palembang. Di samping itu ada juga masyarakat Palembang yang sangat fanatik dengan gelar yang dipakainya. Dia tidak mau kalau namanya dipanggil tanpa gelar yang dipakainya. Bahkan ada yang mengembalikan undangan yang diberikan kepadanya bila tidak dicatumkan gelar yang seharusnya. Misalnya seharusnya ditulis dalam undangan tersebut Kemas Dungik tetapi hanya ditulis Duncik maka undangan tersebut akan dikembalikan kepada orang yang mengundang (Catatan Pribadi Almarhum R.M. Husein, 1992)

Masyarakat Palembang juga memiliki kecenderungan hidup mengelompok dengan keluarga terdekat. Kelompok keluarga ini disebut Goo-gook. Timbulnya goo-gook ini dimulai dengan dari bako yaitu sebutan bagi seseorang terutama laki-laki yang menurunkan suku atau kaum. Bako ini kemudian membuahkan rumpun yang kemudian berkembang menjadi goo-gook. Goo-gook yang ada di Palembang antara lain adalah goo-gook Depaten, Purban, Kedipan, Pengulo, Demang Moral, Masigit, Kyai Syekh Azhari, Ranggo Wiro Sentik, Demang Darpo Terayo, Kyai Pedatukan, Kyai Merogan, Pangeran Perdano Menteri, Pangeran Mangku dan Pangeran Pabil (Catatan Pribadi Almarhum R.M. Husein, 1992).

Dalam suatu goo-gook, biasanya hanya dihuni oleh lapisan tertentu, misalnya goo-gook Demang Darpo Terayo terdiri dari golongan Kemas saja. Dalam kehidupannya, mereka hanya bergaul dengan orang di dalam goo-gook itu saja atau bergaul dengan goo-gook tertentu. Hal ini menjadikan pergaulan mereka sangat terbatas sehingga dapat dikatakan bahwa mereka seperti katak dalam tempurung, mereka hanya tahu kehidupan disekitar mereka saja. Dalam

perkawinanpun mereka hanya mengambil di dalam goo-gook itu juga (Wawancara Bapak Abdulrahman, 5 Mei 2017)

Kesetia kawan dalam suatu goo-gook ini sangat kuat sekali. Antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain dalam goo-gook ini hubungannya sangat akrab. Sebaliknya sikap mereka terhadap orang uluan tidak karena orang uluan tidak memiliki gelar (Salman Aly, 1986). Sikap goo-gook ini disebabkan bako dari goo-gook ini adalah bangsawan –bangsawan atau keturunan raja dan pembeda serta ulam Kesultanan Palembang. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan goo-gook ini tinggi pada masa Kesultanan. Kedudukan ini tetap mereka pertahankan walaupun kesultanan Palembang telah mengalami keruntuhan. Hal ini disebut “Past Power Sindrom” yaitu sikap tetap ingin berkuasa walaupun tidak memiliki kekuasaan itu lagi. Mereka ingin tetap dianggap tinggi kedudukannya walaupun keadaannya telah berubah (Wawancara Bapak Abdulrahman, 5 Mei 2017).

Disamping goo-gook merupakan kelompok keluarga, terdapat juga goo-gook yang merupakan lembaga sosial ekonomi. Goo-gook disini merupakan ikatan feodal atau ikatan adat, sebagai organisasi ekonomi yang teratur yang terdiri dari hubungan kekuasaan dan ketaatan yang timbul dari kekuasaan raja-raja dan bangsawan serta kepala yang termasuk dalam lingkungan raja-raja dan bangsawan (Burger, 1957). Ikatan feodal dalam goo-gook ini berlangsung secara horizontal yaitu pengabdian feodal yang mengandung ikatan persaudaraan. Goo-gook ini mempunyai wilayah sektoral yang dikepalai oleh seorang priayi (bangsawan) atau seorang mantri. Dalam goo-gook ini terdiri dari miji beserta alingannya yang memproduksi berdasarkan atas hubungan kerja, bukan oleh kontrak ataupun upah. Sifat produksinya tidak khusus memenuhi kebutuhan sendiri tetapi memenuhi kebutuhan Kesultanan. Wilayah tempat goo-gook ini berada biasanya disenut dengan keahlian atau hasil dari produksinya, misalnya Pelampitan adalah wilayah ahli atau pengrajin lampit, sayangan adalah wilayah ahli tembaga, kuningan adalah wilayah ahli kuningan, Pelengan adalah wilayah ahli pembuat minyak, dan kepandean adalah wilayah ahli besi (Hanafiah, 1989).

Berbeda dengan goo-gook yang merupakan kelompok keluarga yang tetap ada pada masa kolonial bahkan pada masa kemerdekaan, googok yang merupakan lembaga sosial ekonomi ini telah dihapuskan. Goo-gook ini dipecah-pecah dan diganti dengan lembaga sosial ekonomi yang lain. Sesuai dengan kebutuhan pemerintah kolonial maka dibentuk Wijik atau kampung yang dikepalai oleh seorang sirah kampung. Masyarakat yang semula bersifat kolektif menjadi diberi nomor-nomor yang sekarang lazim disebut Kelurahan (Hanafiah, 1989). Adanya gelar-gelar dan kehidupan goo-gook ini tetap bertahan sampai pada awak kemerdekaan Indonesia, walaupun sekarang masih terdapat sisa-sisanya tetapi tidak seperti masa sebelumnya.

#### **d. Hubungan Masyarakat Melayu-Jawa dengan Pendatang Asing Masa Kesultanan Palembang**

Pada awalnya, banyak pendapat yang mengatakan bahwa suku Palembang merupakan hasil peleburan dari beberapa suku seperti Arab, Cina, dan Melayu. Suku-suku ini sudah berabad-abad bermigrasi ke Palembang dan hidup berdampingan dengan warga lokal sekian lama. Bahkan, selama kurun waktu tersebut, terjadi perkawinan campur antara suku asli dengan suku pendatang tersebut. Dari ketiga suku bangsa (Arab, Cina, dan Melayu) ini, lahir sebuah etnik bernama suku Palembang yang mempunyai kebudayaan dan adat-istiadat

tersendiri. Tapi, sebagian masyarakat Palembang tidak sependapat dengan hal tersebut. Mereka mengatakan bahwa jauh sebelum datangnya bangsa Arab, Cina, dan Melayu, suku Palembang telah berkembang di Palembang dan merupakan penghuni pertama wilayah tersebut. Jadi, suku Palembang adalah suku asli dari Palembang dan sebuah komunitas adat tersendiri, bukan campuran beberapa suku bangsa. Tak dapat dipungkiri bahwa perkawinan campur antara suku Palembang dan sejumlah suku bangsa pendatang memang pernah terjadi. Namun, suku-suku bangsa pendatang tersebutlah yang justru masuk ke dalam kebudayaan serta adat istiadat suku Palembang

Dalam sejarah kebudayaan manusia, hubungan antar kelompok masyarakat memungkinkan terjadinya kontak budaya atau yang dikenal dengan istilah akulturasi. Dalam perkembangannya kebudayaan suatu daerah mengalami proses-proses pencampuran yang disebabkan oleh adanya kontak antara masyarakat pendukung kebudayaan tersebut dengan masyarakat pendukung kebudayaan asing. Proses pencampuran budaya ini dikenal dengan istilah akulturasi (Koentjaraningrat 1989). Proses akulturasi akan terjadi karena adanya hubungan dan pergaulan suatu masyarakat pendukung kebudayaan tertentu dengan masyarakat lain, di mana masing-masing masyarakat saling memberikan dan menerima pengaruh. Akulturasi pada dasarnya adalah proses percampuran budaya yang terjadi karena adanya kontak antara masyarakat pendukung kebudayaan tertentu dengan masyarakat pendukung kebudayaan asing.

Keberagaman pemukiman di pinggiran sungai Musi yang terdiri dari berbagai kampung dari berbagai etnis di Palembang jika dicermati secara mendalam mengandung nilai Kebersamaan, kerjasama, dan gotong royong dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini kemudian dapat dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari di dalam lingkup masyarakat secara lokal dan nasional. Tingkat asimilasi dan akulturasi yang tinggi di Palembang tampaknya didukung oleh kondisi topografi dan geografi Palembang itu sendiri. Secara topografis, Palembang adalah suatu kota *waterfont*, yang menghadap ke air (Sungai Musi) dengan anak-anak sungai yang besar dan kecil memotong tepinya sehingga membentuk sebuah laguna. Sungai Musi dapat dilayari oleh kapal-kapal dari muaranya di Muara Sungsang sampai ke pelabuhan yang berada di tengah-tengah Kota Palembang. Kota ini adalah pusat dengan Batanghari Sembilannya, sebagai pintu masuk dan keluar yang penting bagi Sumatera Selatan dan sebagai pertemuan perhubungan darat dan laut.

Pola perdagangan Asia Tenggara yang denyut nadinya membesar di Semenanjung Malaya. Awal abad 13 terbentuk banyak pemukiman di sekitar pantai timur Sumatera. Bertepatan dengan gelombang besar Islamisasi atas kepulauan nusantara, banyak pedagang muslim beragam etnis mulai mendirikan pusat-pusat perdagangan. Malaka, Aceh hingga Palembang menjadi contoh yang baik akan pemukiman Muslim. Etnis Arab telah ada di Palembang sejak abad VII M. Dalam sumber berita Arab disebutkan bahwa kelompok etnis ini singgah di Palembang sebelum melanjutkan perjalanannya ke Cina. Beberapa ahli berpendapat bahwa umumnya kelompok etnis Arab di Indonesia, termasuk Palembang, berasal dari Hadramaut yang terletak di daerah pesisir jazirah Arab bagian selatan, yang sekarang merupakan wilayah negara Yaman. Kelompok etnis ini awalnya merupakan pedagang perantara, seiring dengan perjalanan waktu mereka kemudian menetap dan menikah dengan penduduk Palembang. Pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, di masa pemerintahan

Sultan Abdurrahman (1659-1706), kelompok etnis Arab mendapat kebebasan untuk menetap di daratan karena jasa mereka dalam perekonomian Kesultanan Palembang Darussalam.

Selain berprofesi sebagai pedagang, kelompok etnis Arab juga mempunyai hubungan yang cukup dekat dibanding dengan kelompok etnis asing lainnya. Dari tinggalan-tinggalan arkeologi yang berupa makam, baik itu makam para Sultan Palembang Darussalam maupun makam para bangsawan Kesultanan, selalu didampingi oleh makam ulama yang merupakan guru agama sultan dan kerabat-kerabat Kesultanan. Selain makam, data arkeologi yang menunjukkan kedekatan kelompok etnis Arab dengan Kesultanan Palembang Darussalam berupa naskah-naskah keagamaan yang dijadikan koleksi sultan. Keberadaan naskah-naskah tersebut membuktikan bahwa pada masa Kesultanan kelompok etnis Arab juga berperan sebagai juru tulis kitab-kitab Agama Islam. Kedekatan kelompok etnis Arab dengan Sultan juga ditunjukkan dengan pemberian gelar Pangeran (Sevenhoeven 2015). Pada masa selanjutnya, pemerintah kolonial Hindia-Belanda juga menunjuk seorang dari kelompok etnis Arab sebagai pemimpin kelompok tersebut. Orang-orang yang ditunjuk tersebut diberi pangkat seperti dalam pangkat kemiliteran yaitu Kapten atau Mayor.

Kelompok etnis Cina umumnya berprofesi sebagai pedagang, selain itu mereka juga berprofesi di bidang pertukangan. Pada masa Kesultanan, kelompok etnis Cina yang beragama Islam, umumnya pejabat administrasi tambang, diberi gelar Demang oleh Sultan. Demikian juga pada masa selanjutnya, pemerintah kolonial Hindia-Belanda juga mengangkat seorang dari kelompok etnis tersebut sebagai pemimpin kelompok. Orang-orang yang ditunjuk tersebut diberi pangkat seperti dalam pangkat kemiliteran yaitu Kapten atau Mayor. Bukan hanya kebudayaan Jawa yang memiliki tempat dibagian arsitektur eksistensi orang-orang Cina di Palembang tidak hanya penggerak perdagangannya, sedangkan pendudukan setempat adalah berperan sebagai produsen atau konsumen dari perdagangan yang ada, dengan saham-saham tertentu di bidang politik pemerintahan, yaitu penggerak dalam mobilisasi tenaga milisi dan logistik, namun juga memiliki andil besar dari asimilasi kebudayaan yang ada di Palembang, dan kebudayaan lokal yang juga menyesuaikan dengan datangnya kebudayaan yang baru tersebut melebur menjadi satu dan menghasilkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur percampuran budaya di dalamnya (Wawancara dengan Bapak Mulyadi, 4 Mei 2017).

## **Kesimpulan**

Timbulnya pelapisan sosial pada masyarakat Palembang khususnya suku Melayu-Jawa dipengaruhi pola kepemimpinan yang ada di daerah Sumatera Selatan yaitu sejak berdirinya Kesultanan Palembang. Pada masa Kesultanan Palembang terbagi dua golongan besar yaitu golongan bangsawan terdiri dari Pangeran, Raden, dan Masagus. Sedangkan golongan terdiri dari Kemas, Kiagus dan rakyat jelata yaitu orang-orang miji, orang senan dan orang-orang yang menggadaikan diri atau budak. Di luar kedua golongan ini terdapat golongan ulama yang mendapat tempat tersendiri. Pelapisan sosial masyarakat ini mewarnai kehidupan masyarakat Palembang dengan dipergumakan gelar-gelar sesuai wilayah Goo-gook. Masyarakat Melayu-Jawa Palembang menjalin kerjasama yang baik dengan etnis pendatang seperti etnis Cina, Arab dan India dengan perdagangan dan penyebaran agama Islam, serta dengan asimilasi dan akulturasi budaya melalui perkawinan antar etnis. Hal ini menunjukkan masyarakat Palembang mempunyai nilai toleransi yang tinggi sejak zaman Kesultanan Palembang.

## Referensi

- Abdullah, Ma'Moen, Drs. 1983. *Stratifikasi sosial dan pola kepemimpinan lokal di Sumatera Selatan, dalam Pendidikan sebagai Dinamisasi Sosial*. Jakarta: Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan dokumentasi Sejarah Nasional
- Abdurrahman, Dudung. 2011. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta : Penerbit Ombak
- Cosim, H. Rusdhy.1986. *Sejarah Kerajaan Palembang dan Perkembangan Hukum Islam*.Makalah Seminar Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan, Jakarta : UI-Press
- Ali, Amin. H.M. 1986. *Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam*.Makalah seminar masuk dan berkembangnya Islam di Sumatera Selatan.Jakarta:UI-Press
- Faille,P. De Roo de La.1971. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*.Jakarta : Bharata
- Graaf H.J.De. 1987. *Awal Kebangkitan Mataram Masa Pemerintahan Senapati*.Jakarta : Grafitipers
- Hanafiah, Djohan. 1998. *Sejarah Perkembangan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang*
- \_\_\_\_\_. 1995. *Melayu-Jawa Citra Budaya dan Sejarah Palembang*. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang
- \_\_\_\_\_. 1989. *Kuto Besak, Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*. Jakarta : CV Mas Agung
- Kartodirjo, Sartono. 1993 . *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Koentjaraningrat.1990.Pengantar Ilmu Antropologi.Jakarta : Rineka Cipta
- Kemas, Ari. 2001. *Masyarakat Tianghoa Palembang*. Forum Pengkajian Sejarah Sosial dan Budaya dengan Paguyuban Sosial Masyarakat Tianghoa Indonesia
- Koentjaraningrat. 1989. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia
- Salman, Ali. 1986.*Sejarah Kesultanan Palembang, Makalah Seminar Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Jakarta : UI-Press
- Sevenhoven, J.I. Van. 2015. *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*. Yogyakarta : Penerbit Ombak